

**ANALISIS DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT  
TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI DI PULAU  
SUMATERA**



Skripsi oleh:

**Tiara Virda Rosaini**

**01021282025109**

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**  
**ANALISIS DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**  
**TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI DI**  
**PULAU SUMATERA**

Disusun Oleh,

Nama : Tiara Virda Rosaini  
NIM : 01021282025109  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 20 Juni 2024



Dr. Siti Rohima S.E., M.Si  
NIP. 196903142014092001

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**ANALISIS DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**  
**TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI DI**  
**PULAU SUMATERA**

Disusun oleh

Nama : Tiara Virda Rosaini

NIM : 01021282025109

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi  
Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 22 Juli 2024  
dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, 22 Juli 2024

Ketua



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si  
NIP. 196903142014092001

Anggota



Dr. Sukanto, S.E., M.Si  
NIP. 197403252009121001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

**ASLI**  
JUR. EK. PEMBANGUNAN ..... 11-9-2024 .....  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI .....



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tiara Virda Rosaini  
NIM : 01021282025109  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal  
Pada Provinsi di Pulau Sumatera

Pembimbing : Dr. Siti Rohima, S.E.,M.Si

Tanggal Ujian : 22 Juli 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri, dalam skripsi tidak ada kutipan  
hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila  
pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut  
predikat kelulusan dangelar kesarjanaaan.

Indralaya, 22 Juli 2024  
Pembuat Pernyataan

**ASLI**  
JUR. EK. PEMBANGUNAN ..... 11-9-2024 .....  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI .....



Tiara Virda Rosaini  
NIM. 01021282025109

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera ”. Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Dana Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera. Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, namun kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Indralaya, 14 Juni 2024



Tiara Virda Rosaini  
NIM.01021282025109

## UCAPAN TERIMA KASIH

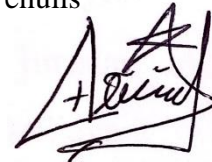
Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yangsebesar-besarnya kepada:

1. Rasa syukur yang amat dalam dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada tim penulis berupa nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan dan juga kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak Halimurrosyid dan Ibu IGN. Anggriani selaku kedua orang tua, terima kasih yang takterhingga serta cinta dan kasih sayang selama ini telah membantu penulis dalambentuk perhatian, kasih sayang, semangat, tidak pernah lelah memberikan motivasi serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak tercinta Muhammad Hariz Al-Hakim beserta Om dan Tante saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si sekretaris jurusan ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu serta saran masukan hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini

9. Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran-saran terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh dosen di lingkungan jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan materi dan ilmunya pada saat perkuliahan.
11. Teman-teman jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2020 Indralaya dan teman-teman konsentrasi Ekonomi Keuangan Daerah angkatan 2020 yang telah memberikan warna selama perkuliahan.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Indralaya, 14 Juni 2024

Penulis



Tiara Virda Rosaini

NIM. 01021282025109

## ABSTRAK

### ANALISIS DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Oleh:  
**Tiara Virda Rosaini; Siti Rohima**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera dalam periode 2013 hingga 2023. Dengan menggunakan regresi data panel, penelitian ini menemukan bahwa DAK dan DBH secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja modal. DAK berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, sementara DBH, khususnya dari sektor minyak dan gas, mendorong peningkatan belanja modal yang berfokus pada pembangunan infrastruktur vital. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah, melalui DAK dan DBH, berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan DAK dan DBH dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Transfer Pemerintah

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis., S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si  
NIP. 196903142014092001



**ABSTRACT**

**ANALYSIS OF CENTRAL GOVERNMENT TRANSFER FUNDS TO  
CAPITAL EXPENDITURE IN THE PROVINCES ON THE ISLAND OF  
SUMATERA**

**By:  
Tiara Virda Rosaini; Siti Rohima**

This study aims to analyze the impact of Special Allocation Funds (DAK) and Revenue Sharing Funds (DBH) on capital expenditures in ten provinces on the island of Sumatra during the period from 2013 to 2023. Using panel data regression, this study finds that DAK and DBH have a significantly positive effect on capital expenditures. DAK plays a crucial role in infrastructure development and enhancing the economic capacity of regions, while DBH, particularly from the oil and gas sector, drives increases in capital expenditures focused on vital infrastructure development. Overall, the results of this study indicate that fiscal transfers from the central government to the regions, through DAK and DBH, contribute to infrastructure development and the welfare of communities in Sumatra. This study also provides recommendations for local governments to improve the efficiency and effectiveness of DAK and DBH utilization in supporting economic growth and improving the quality of life of the people.

**Keywords:** Capital Expenditure, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Government Transfer

Known by,  
Head of Development Economics Departement

Advisor



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si  
NIP. 196903142014092001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Tiara Virda Rosaini
	NIM	01021282025109
	Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 20 Januari 2002
	Alamat	DESA KARANG ENDAH RT 02 RW 02 KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM
	Handphone	085788330403
AGAMA	Islam	
JENIS KELAMIN	Perempuan	
KEWARGANEGARAAN	Indonesia (WNI)	
TINGGI BADAN	165 cm	
BERAT BADAN	58 kg	
EMAIL	<a href="mailto:Tiaravirda12@gmail.com">Tiaravirda12@gmail.com</a>	
<b>RIWAYAT PENDIDIKAN</b>		
2008-2014	SD Negeri 5 Gelumbang	
2014-2017	SMP Negeri 2 Gelumbang	
2017-2020	SMA Negeri 1 Lembak	
2020-2024	Universitas Sriwijaya	
<b>RIWAYAT ORGANISASI</b>		
2020-2021	Staff Divisi Medinfo IMEPA FE Unsri	
2021-2022	Staff Ahli BEM KM FE Unsri	

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2. Manfaat Praktis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
2.1. Teori Transfer Pemerintah .....	14
2.2. Definisi dan Konsep .....	16
2.2.1. Belanja Modal.....	16
2.2.2. Dana Alokasi Khusus.....	19
2.2.3. Dana Bagi Hasil.....	20
2.3. Penelitian Terdahulu .....	22
2.4. Kerangka Pikir.....	31
2.5. Hipotesis Penelitian .....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	34
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	34
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3. Teknik Analisis .....	34
3.3.1. Pemilihan Model Terbaik.....	36
3.3.2. Uji Asumsi Klasik.....	38
3.3.3. Uji Statistik.....	40
3.3.4. Koefisien Determinasi (R-squared) .....	41
3.4. Definisi Operasional Variabel .....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Gambaran Umum .....	43
4.1.1. Kondisi Geografis Pulau Sumatera.....	43
4.1.2. Perkembangan Belanja Modal di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera... 46	
4.1.3. Perkembangan Dana Alokasi Khusus di Provinsi-Provinsi Pulau	

Sumatera.....	49
4.1.4. Perkembangan Dana Bagi Hasil Provinsi di Pulau Sumatera .....	51
4.2. Hasil Penelitian.....	55
4.2.1. Model Regresi Data Panel.....	55
4.2.2. Pemilihan Model Akhir.....	56
4.2.3. Analisis Individu.....	58
4.2.4. Pengujian Asumsi Klasik .....	61
4.2.4.2. Uji Multikolinearitas .....	62
4.2.5. Pengujian Koefisien Statistik .....	63
4.6. Pembahasan.....	66
4.6.1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.....	66
4.6.2. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.....	69
4.6.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal .....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Dana Alokasi Khusus Pulau Sumatera Tahun 2021-2023 (MiliarRupiah).....	7
Gambar 1. 2 Dana Bagi Hasil Pulau Sumatera Tahun 2021-2023 (MiliarRupiah).....	8
Gambar 2. 1 Kurva Transfer Tidak Bersyarat .....	12
Gambar 2. 2 Kurva transfer bersyarat tanpa dana pendamping .....	13
Gambar 2. 3 Kerangka Pikir .....	28
Gambar 4. 1 Belanja Modal Pulau Sumatera Tahun 2013-2023 (RibuRupiah) .....	42
Gambar 4. 2 Dana Alokasi Khusus Pulau Sumatera Tahun 2013-2023 (Ribu Rupiah) .....	44
Gambar 4. 3 Dana Bagi Hasil Pulau Sumatera Tahun 2013-2023 (RibuRupiah).....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Belanja Modal di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2021-2023 ( Dalam Miliar Rupiah).....	4
Tabel 4. 1 Luas Wilayah, Persentase terhadap Luas Wilayah, dan Jumlah Pulau di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera.....	39
Tabel 4. 2 Hasil Estimasi dengan Metode CEM, FEM, dan REM .....	49
Tabel 4. 3 Hasil Regresi Uji Pemilihan Model Terbaik .....	50
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Metode Random Effect Model .....	51
Tabel 4. 5 Nilai Intersep Individu Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera .....	52
Tabel 4. 6 Persyaratan Uji Asumsi Klasik Regresi Data Panel.....	54
Tabel 4. 7 Uji Normalitas .....	55
Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas .....	56
Tabel 4. 9 Uji F-statistik.....	56
Tabel 4. 10 Hasil Uji-t.....	57
Tabel 4. 11 Koefisien Determinasi R-squared.....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian .....	76
Lampiran 2. Uji Chow .....	79
Lampiran 3. Uji Hausman .....	79
Lampiran 4. LM Test.....	79
Lampiran 5. CEM.....	80
Lampiran 6. FEM .....	80
Lampiran 7. REM.....	81
Lampiran 8. Heteroskedasticity .....	82
Lampiran 9. Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson .....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja pemerintah merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik serta menjalankan program-program yang telah ditetapkan. Pengeluaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, hingga investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan berbagai fasilitas. Di dalam belanja pemerintah, terdapat kategori yang disebut sebagai belanja modal. Belanja modal pemerintah merujuk pada pengeluaran yang khusus diarahkan untuk mendapatkan atau meningkatkan aset modal. Aset-aset ini memiliki nilai jangka panjang dan umumnya berupa infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, gedung pemerintah, pelabuhan, bandara, dan proyek-proyek konstruksi lainnya. Pengeluaran dalam belanja modal dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah dan masyarakat.

Keuangan daerah, yang mencakup belanja daerah dan pendapatan asli daerah, menjadi inti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Maknun, 2023). Setiap pemerintah daerah, sebagai otoritas otonom, wajib mengelola anggaran belanja daerah, termasuk pengeluaran, sebagai bagian dari pelaksanaan rencana kerja tahun berikutnya. Belanja daerah, khususnya dalam bentuk belanja modal, menjadi sarana utama untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (Kherbache & Oukaci, 2020). Dalam kerangka ini, pengelolaan sumber daya keuangan menjadi kritis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam



pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur serta inisiatif pembangunan lainnya. Pemilihan dan pengalokasian dana belanja modal di tingkat daerah menjadi keputusan strategis yang harus diambil dengan cermat untuk memastikan keberlanjutan dan pencapaian hasil pembangunan yang optimal.

Investasi dalam belanja modal pemerintah memegang peran penting dalam merangsang pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Melalui alokasi dana pada infrastruktur dan aset-aset strategis lainnya, pemerintah dapat tidak hanya menciptakan peluang lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional ekonomi dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mazelis et al., 2020). Signifikansinya tidak hanya terbatas pada dampak langsungnya, tetapi belanja modal pemerintah juga berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan sektor swasta. Keberadaan infrastruktur yang baik seringkali menjadi landasan bagi aktivitas bisnis dan investasi, memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan sektor swasta dan, akhirnya, mendorong perkembangan ekonomi nasional secara menyeluruh (Zangouezhad & Azar, 2014).

Pulau Sumatera, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi regional. Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam analisis ini adalah Belanja Modal. Belanja Modal mencerminkan investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kapasitas daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya, pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Pulau Sumatera memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor ini dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dan memperkuat daya saing ekonomi regional (Sebayang & Sebayang, 2020). Selain itu, belanja modal juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup penduduk dan potensi pembangunan manusia di Pulau Sumatera.

Belanja modal menjadi instrumen kunci dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah ini, memungkinkan provinsi-provinsi tersebut untuk menginvestasikan dana sesuai dengan kebijakan pembangunan mereka sendiri (Sumarajaya et al., 2020). Melalui alokasi dana yang tepat pada belanja modal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat di tingkat lokal (Farida, 2021; Purbadharmaja et al., 2019). Oleh karena itu, pengelolaan belanja modal dengan efisien dan transparan menjadi aspek penting dalam mendukung visi dan misi otonomi daerah di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera.

Melalui belanja modal, pemerintah daerah juga dapat merangsang pertumbuhan sektor swasta dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pengembangan usaha, Pulau Sumatera dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks fluktuasi belanja modal di Pulau Sumatera, perubahan prioritas pembangunan, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi global dan nasional dapat menjadi faktor yang memengaruhi alokasi dana. Tabel 1 menyajikan data Belanja Modal di berbagai provinsi Pulau Sumatera dari tahun 2021 hingga 2023.

**Tabel 1. 1 Belanja Modal di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2021-2023 ( Dalam Miliar Rupiah)**

Provinsi	2021	2022	2023
Aceh	2.199,33	2.868,71	1.668,91
Sumatera Utara	1.141,2	1776,12	2.629,55
Bengkulu	324,34	417,02	586,9
Sumatera Selatan	1.836,83	1.536,37	1.239,94
Riau	1.018,46	1.508,53	2.082,95
Lampung	849,69	1.025,33	1.207,6
Sumatera Barat	666,35	941,07	952,72
Jambi	449,69	906,8	1.031
Kepulauan Riau	338,33	552,16	619,01
Bangka Belitung	428,65	354,01	566,22

**Sumber:** *Direktorat jenderal perimbangan keuangan, 2023 (data diolah)*

Data Belanja Modal tahun 2021 hingga 2023 mengungkapkan tren yang menarik, di mana Aceh menunjukkan Belanja Modal tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai Rp2.199 miliar sedangkan Bengkulu memiliki Belanja Modal terendah pada periode yang sama dengan nilai Rp324 miliar. Namun, fluktuasi signifikan terjadi dalam Belanja Modal di seluruh provinsi selama tiga tahun berikutnya. Pada tahun 2022, sebagian besar provinsi mengalami peningkatan Belanja Modal dengan Sumatera Utara mencatat pertumbuhan yang signifikan dari Rp1.141 miliar menjadi Rp1.776 miliar. Akan tetapi, Aceh mengalami penurunan yang mencolok dari posisi tertinggi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, pola ini berubah lagi,

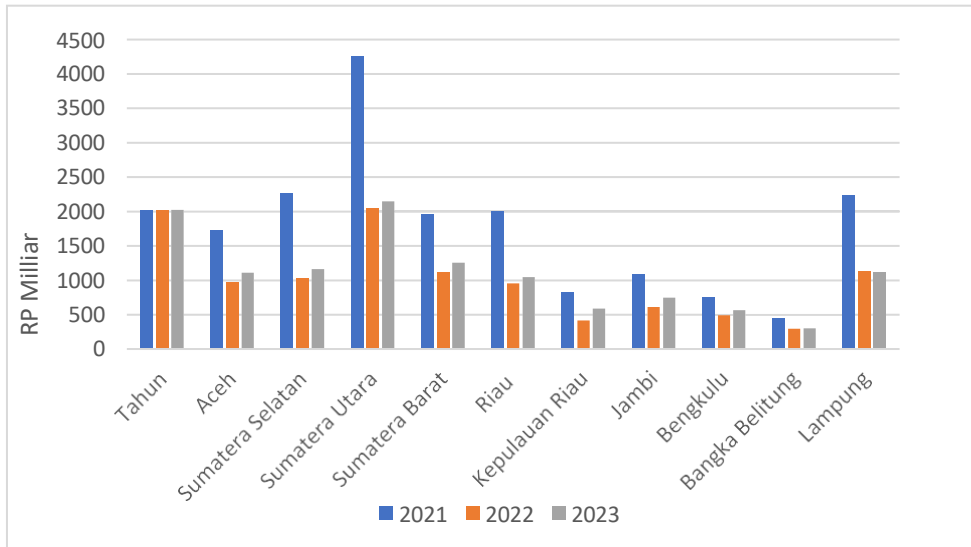
dengan beberapa provinsi mengalami penurunan Belanja Modal, sementara yang lainnya mengalami peningkatan.

Fluktuasi dalam Belanja Modal ini mengungkap bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi termasuk perubahan kebijakan pemerintah daerah, proyek pembangunan yang sedang berlangsung, dan prioritas pengeluaran di masing-masing provinsi. Selain itu penting juga untuk mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap pola pengeluaran dan pembangunan di provinsi-provinsi Pulau Sumatera. Pandemi telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan perubahan dalam kebijakan anggaran di semua tingkatan pemerintahan. Provinsi-provinsi ini mengalami penyesuaian anggaran untuk menanggapi tantangan yang dihadapi akibat pandemi, termasuk peningkatan belanja kesehatan dan sosial, serta penundaan atau perubahan proyek-proyek infrastruktur.

Belanja modal yang mencakup investasi jangka panjang untuk pembangunan daerah, dipengaruhi oleh berbagai komponen alokasi dana, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Meskipun DAK memberikan dukungan khusus untuk infrastruktur, memunculkan perdebatan terkait fleksibilitas penggunaannya. Dalam literatur terdahulu, terdapat perdebatan yang cukup substansial mengenai dampak Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal. Beberapa penelitian menekankan bahwa DBH dapat memberikan kontribusi signifikan sebagai sumber pendanaan, mendorong peningkatan kinerja fiskal pemerintah daerah dan peningkatan alokasi dana untuk belanja modal (Jin et al., 2005; Isufaj, 2014). Namun, beberapa penelitian lain menyoroti adanya ketidakpastian sumber daya, terutama dalam sektor ekstraktif seperti minyak dan gas, yang mempengaruhi keberlanjutan pembiayaan belanja modal jangka panjang

(Heller, 2005). Beberapa penelitian mendukung pandangan bahwa DAK, khususnya yang diarahkan pada infrastruktur atau pembangunan, dapat memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal (Gemmell et al., 2016; Tandberg & Ness, 2011). Namun, dari sudut pandang lain, beberapa penelitian mencatat bahwa pembatasan penggunaan DAK dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja modal sesuai dengan kebutuhan lokal (Faguet, 2004; Wilson & Game, 2011).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang penting dalam konteks pembangunan di Indonesia. Fungsinya adalah untuk mengalokasikan dana tambahan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan tujuan mendukung pembangunan di sektor-sektor prioritas serta mengurangi disparitas pembangunan antar daerah. Dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pembangunan lainnya yang mungkin tidak dapat sepenuhnya didanai oleh anggaran daerah setempat. Dengan demikian, DAK menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera. Gambar 1.1. menunjukkan realisasi Dana Alokasi Khusus Pulau Sumatera dari tahun 2021 hingga 2023.



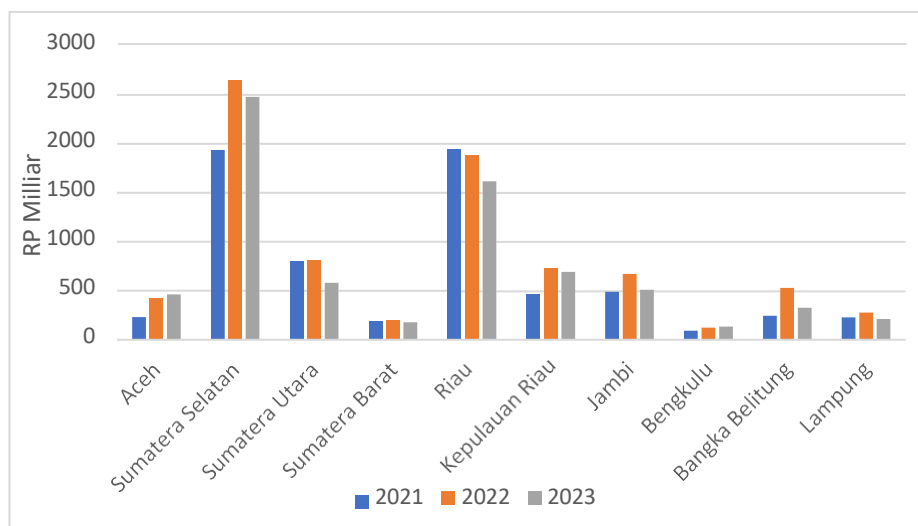
**Gambar 1. 1 Dana Alokasi Khusus Pulau Sumatera Tahun 2021-2023 (Miliar Rupiah)**

Sumber: *Direktorat jenderal perimbangan keuangan, 2024 (data diolah)*

Dana Alokasi Khusus (DAK) di Pulau Sumatera menunjukkan dinamika yang signifikan selama periode 2021 hingga 2023 (Gambar 1.1). Terdapat fluktuasi nilai DAK, dengan sebagian besar provinsi mengalami penurunan pada tahun 2022, yang diikuti oleh peningkatan kembali pada tahun 2023. Sumatera Utara menjadi sorotan utama dengan pertumbuhan yang mencolok dalam alokasi DAK, mencapai Rp2.150 miliar pada tahun 2023 dari Rp4260.68 miliar pada tahun 2021. Provinsi Aceh juga mengalami perubahan yang drastis, dengan penurunan yang tajam pada tahun 2022 dan pemulihan pada tahun 2023. Selain itu, fluktuasi nilai DAK menunjukkan perlunya pemantauan dan evaluasi yang cermat terhadap kebijakan pembangunan di Pulau Sumatera. Faktor-faktor seperti perubahan prioritas pembangunan, perubahan kebijakan pemerintah, dan kebutuhan mendesak masyarakat dapat menjadi pendorong perubahan dalam alokasi dana. Penurunan nilai alokasi pada tahun 2022 dan pemulihan pada tahun 2023 dapat mencerminkan upaya pemulihan ekonomi setelah dampak ekonomi negatif pada tahun 2020 dan 2021. Alokasi dana mencakup proyek stimulus untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem fiskal Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pembangunan di tingkat regional. Mekanisme pembagian DBH didasarkan pada prinsip otonomi daerah, di mana dana ini diperoleh dari pajak-pajak tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Setelah dipungut, dana DBH kemudian dibagi secara proporsional kepada berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. DBH memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan di tingkat regional dengan memberikan tambahan pendapatan kepada pemerintah daerah. Pendapatan tambahan ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pembangunan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Gambar 1.2 menunjukkan realisasi Dana Bagi Hasil Pulau Sumatera dari tahun 2021 hingga 2023.



**Gambar 1. 2 Dana Bagi Hasil Pulau Sumatera Tahun 2021-2023 (Miliar Rupiah)**

Sumber: *Direktorat jenderal perimbangan keuangan, 2024 (data diolah)*

Pada tahun 2021, Sumatera Selatan mendominasi dengan alokasi DBH tertinggi, mencapai Rp1.936,83 miliar diikuti oleh Riau dengan Rp1.942,42 miliar dan Aceh dengan Rp231,73 miliar. Namun, terjadi perubahan yang signifikan pada tahun 2022, di mana Aceh menjadi provinsi dengan alokasi DBH paling tinggi, yaitu Rp427,86 miliar diikuti oleh Sumatera Selatan dengan Rp2.652,59 miliar dan Riau dengan Rp1.879,97 miliar. Sedangkan pada tahun 2023, Aceh tetap mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan alokasi DBH terbesar, mencapai Rp461,6 miliar, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan Rp2.480,24 miliar dan Riau dengan Rp1.615,51 miliar. Fluktuasi signifikan juga terjadi pada beberapa provinsi. Misalnya, Sumatera Selatan mengalami penurunan alokasi DBH yang cukup drastis dari tahun 2021 ke 2022, namun meningkat kembali pada tahun 2023. Sementara itu, provinsi-provinsi lain seperti Bangka Belitung mengalami peningkatan alokasi DBH dari tahun 2022 ke 2023.

Penurunan alokasi DBH pada beberapa provinsi, seperti Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, mungkin merupakan akibat dari perubahan dalam struktur ekonomi regional atau kebijakan redistribusi pendapatan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan peningkatan alokasi di provinsi lain, seperti Bangka Belitung, mungkin mencerminkan upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah tersebut. Selain itu, fluktuasi dalam alokasi DBH juga dapat dipengaruhi oleh dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Provinsi-provinsi yang lebih tergantung pada sektor-sektor yang terpuakul keras oleh pembatasan dan penurunan aktivitas ekonomi selama pandemi mungkin mengalami penurunan alokasi DBH sebagai respons terhadap kondisi tersebut.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat mengungkap efektivitas dan



efisiensi dari transfer pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan di tingkat regional. Fenomena ini berkaitan erat dengan distribusi dana untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek di tingkat provinsi, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana transfer dana pusat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing ekonomi di Pulau Sumatera. Keterbaruan penelitian ini terletak pada potensinya untuk memberikan masukan kebijakan yang berharga bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi dana. Dengan menganalisis seluruh transfer pemerintah pusat, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan di tingkat provinsi, menjadikannya sebuah kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan pembangunan regional di Pulau Sumatera.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Provinsi di Pulau Sumatera?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang disusun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Provinsi di Pulau Sumatera.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan akademis di bidang keuangan publik dan otonomi daerah.
2. Temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan teori keuangan publik, khususnya dalam konteks alokasi dana dan pengaruhnya terhadap belanja modal pemerintah daerah. Ini dapat membantu memperkaya kerangka teoritis yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan manajemen keuangan publik di tingkat regional.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari hasil kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan praktis untuk perbaikan kebijakan fiskal di tingkat provinsi di Pulau Sumatera. Pemerintah daerah dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun strategi alokasi dana yang lebih efektif dan efisien.
2. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil untuk mendukung Belanja Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adur, V. R. G. B., Apriyanto, G., & Sutriwanto. (2019). Impact of pure regional income (PAD), general allocation funds (DAU) and special allocation funds (DAK) toward capital expenditures and its impact on economic growth (Case Study of Local Government in Malang Area). *International Journal of Academic Research and Development*, 4(6), 10–19. [www.academicjournal.in](http://www.academicjournal.in)
- Ananda, F., & Hariani, D. (2022). The Effect Of Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds And Rest Of Budget Calculations On Capital Expenditures In District And City Governments In West Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1), 110–129. <https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1.327>
- Bank Indonesia. (2024a). Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. In *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2024b). Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara Februari 2024. In *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>
- Bisri. (2023). *Serapan Dana Bagi Hasil di Bengkulu Masih Rendah*. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/462144/serapan-dana-bagi-hasil-di-bengkulu-masih-rendah>
- Darwin. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media.
- Dewi, N. P. V. C., Dewi, T. K., & Asana, G. H. S. (2023). Belanja Modal Ditinjau dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2020. *Journal Research of Accounting (JARAC)*, 5(1), 58–78. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- DJPb Prov. Riau. (2023). *Kinerja dan Fakta APBN Riau s.d. 30 Juni 2023: Tetap Solid dan Kuat*. Kementerian Keuangan. <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/riau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2928-kinerja-dan-fakta-apbn-riau-s-d-30-juni-2023-tetap-solid-dan->

kuat.html

- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati, E. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 85–94. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/917/582>
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP ( Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>
- Faguet, J. P. (2004). Does decentralization increase government responsiveness to local needs? Evidence from Bolivia. *Journal of Public Economics*, 88(3–4), 867–893. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(02\)00185-8](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00185-8)
- Farida, N. (2021). Fiscal Decentralization, Economic Growth and Regional Development Inequality in Eastern Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(2), 1–9. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2021.009.02.1>
- Gemmell, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2016). Does the Composition of Government Expenditure Matter for Long-Run GDP Levels? *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 78(4), 522–547. <https://doi.org/10.1111/obes.12121>
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain*. Erlangga.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics-Fifth Edition*.
- Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Modal. *Kinerja*, 14(2), 85–91. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/2483>

- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah (Pertama)*. Salemba Empat.
- Heller, M. P. S. (2005). *Understanding fiscal space*. International Monetary Fund.
- Ishak, J. F., Sari, Y. P., Dwitayanti, Y., & Mauluddi, H. A. (2021). The Determinants Factors of Capital Expenditure. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2(2), 158–165. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v2i2.224>
- Isufaj, M. (2014). Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 459–463. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.490>
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 335–341. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045>
- Jin, H., Qian, Y., & Weingast, B. R. (2005). Regional decentralization and fiscal incentives: Federalism, Chinese style. *Journal of Public Economics*, 89(9–10), 1719–1742. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.11.008>
- Kementerian Keuangan. (2023). Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Prov. Sumut. In *Kementerian Keuangan Kanwil DJPb Prov. Sumut*. <https://doi.org/10.36805/bi.v1i2.139>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Belanja Negara di Aceh Tahun 2023 Mencapai 48,14 Triliun*. Kementerian Keuangan RI Kanwil DJPB Prov Aceh. <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh/id/data-dan-publikasi/berita-terbaru/3075-belanja-negara-di-aceh-tahun-2023-mencapai-48,14-triliun.html>
- Kherbache, N., & Oukaci, K. (2020). Assessment of capital expenditure in achieving sanitation-related MDG targets and the uncertainties of the SDG targets in Algeria. *World Development Perspectives*, 19(November 2019), 100236. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100236>
- Kuntari, Y., Chariri, A., & Prabowo, T. J. W. (2019). Capital expenditure of local

- governments. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1).
- Lihu, M., Effendi, U., & Negara, C. K. (2022). Revenue Sharing Concerning General, Special Allocation Funds, and Autonomy for Capital Expenditures About Economic Growth. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), 701–710. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/396%0Ahttp://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/download/396/319>
- Maknun, M. (2023). Impact of Regional Revenue and Expenditure Budgets and Economic Growth on the Human Development Index. *Advances in Economics & Financial Studies*, 1(1), 25–35. <https://doi.org/10.60079/aefts.v1i1.9>
- Mazelis, L. S., Lavrenyuk, K. I., Krasko, A. A., & Krasova, E. V. (2020). Development of a method for forming an optimal portfolio of regional projects to achieve strategic regional development targets. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 13(12), 4402–4416.
- Muda, I., & Ridha, H. (2018). Effect of Revenue and General Allocation Fund of Capital Expenditures in the Economic Growth as Moderator Variable. Case of Indonesia. *Academic Journal of Economic Studies*, 4(1), 29–39.
- Mulya, R. (2016). Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 1.
- Mulyana, M., Din, M., Mustamin, M., Amir, A. M., Karim, F., & Betty, B. (2022). Local Government Own-source Revenue and General Allocation Funds on Capital Expenditure: Economic Growth as Moderating Variable. *Arthatama Journal of Business Management and Accounting*, 6(1), 44–54. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3569667&val=31015&title=Local Government Own-source Revenue and General Allocation Funds on Capital Expenditure Economic Growth as Moderating Variable](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3569667&val=31015&title=Local%20Government%20Own-source%20Revenue%20and%20General%20Allocation%20Funds%20on%20Capital%20Expenditure%20Economic%20Growth%20as%20Moderating%20Variable)
- Oktoriza, L. A., Widowati, A. I., & Surjawati. (2022). Factors Affecting Capital Expenditure Allocation In Central Java Province. *Jurnal Manajemen Dan Dinamika Bisnis*, Vol. 1(No. 1), 15–27.

- Pelealu, A. M. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA*, 1(4), 1189–1197.
- Prabawati, P. S. S., & Wany, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, XV(1), 1. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v0i0.414>
- Priyono, I. A., & Khotimah, H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Jawa Timur Tahun 2019-2021. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(2), 235–245. [https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/TABR/article/download/1802/07\\_1802](https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/TABR/article/download/1802/07_1802)
- Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, I. B. P., Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249. <https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>
- Putra, D., & Dwirandara. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 811–827.
- Qosim, N. (2022). Revenue (Pad), General Allocation Fund (Dau), Special Allocation Fund (Dak) On Capital Expenditure (Survey In Districts/Cities In Central Sulawesi. *MANAGER: Journal of Management and Administration Science*, 1(2), 44–52. <https://doi.org/10.58738/manager.v2il.421>
- Rohima, S., Bashir, A., & Kesuma, A. (n.d.). *The Effect of Taxes and Capital Expenditures on Economic Growth The Effects of the COVID-19 Pandemic in Indonesia*. 115–129.
- Safitri, I., Hasibuan, B. K., Silalahi, A. S., & Syahyunan. (2021). The Effect Of Regional Original Income, General Allocation Funds, Specific Allocation

Funds, And Fund For The Results Of The District Capital Expenditure Allocation And North Sumatra Province City, 2010-2019. *Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 1(2), 2010–2019. <https://doi.org/10.32734/jomas.v1i2.6289>

Santy, D., Amir, A., & Wahyudi, I. (2020). The Effect Of Regional Tax Revenue, Regional Retribution and Revenue Sharing Funds On Regency/City Capital Expenditure In Jambi Province 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(3), 203–212. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku>

Sarwono, A. E., & Astuti, D. S. P. (2021). The Role of Moderating Economic Growth Variables on the Effect of Allocation Funds and Capital Expenditures in Local Government. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(3), 471–475. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i3.95>

Sebayang, A. F., & Sebayang, L. K. (2020). Infrastructure Investment and Its Impact to Regional Development. *Economics Development Analysis Journal*, 9(3), 269–280. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>

Sibarani, C. G. G. T., Ginting, J., Vivi Afriliani, & Nasrullah Hidayat. (2022). Influence of Profit Sharing Funds and Regional Financial Performance in the Previous Year on the Allocation of Capital Expenditures in Provincial Governments in Indonesia in 2016 – 2020. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 3(2), 281–293.

<https://doi.org/10.53695/injects.v3i2.796>

Sumarajaya, I., Budhi, M., & Yasa, I. (2020). Government Policies in Regional Finance and Asset Management in Regional Autonomy Implementation in the Province of Bali , Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(08), 159–174.

Suryantini, N. P. S., Candraningrat, I. R., & Kusumadewi, N. M. W. (2017). the Influence of Dau (General Allocation Fund) and Dak (Special Allocation Fund) on Capital Expenditure of Bali Province. *Economics & Business Solutions Journal*, 1(2), 1–9. <https://journals.usm.ac.id/index.php/ebsj/article/view/620/402>

Susanti, F., Subowo, A., & Rengga, A. (2015). Evaluasi Dana Alokasi Khusus



- (Dak) Bidang Pendidikan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(2).  
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i2.7705>
- Tandberg, D. A., & Ness, E. C. (2011). State capital expenditures for higher education: " where the real politics happens". *Journal of Education Finance*, 36(4), 394–423. <https://www.jstor.org/stable/23018118>
- Tilaar, S. S., Masinambow, V. A. J., Engka, D. S. M., & Ratulangi, U. S. (2021). *Analisis Dana Transfer Pusat terhadap Belanja Pemerintah Daerah*. 22(1), 117–127.
- Wahyuni, & Adi, P. H. (2009). Analisis pertumbuhan dan kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah. *The 3rd National Conference UKWMS*, 32, 1–23.  
[https://priyohari.files.wordpress.com/2010/01/analisis-pertumbuhan-dana-bagi-hasil\\_revisi\\_uwm3](https://priyohari.files.wordpress.com/2010/01/analisis-pertumbuhan-dana-bagi-hasil_revisi_uwm3)
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(33), 44–51.
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Ruserlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238. <https://doi.org/10.18196/rab.030247>
- Wilson, D., & Game, C. (2011). *Local government in the United Kingdom*. Bloomsbury Publishing
- Yulianti, A. R. (2024, May 16). Pendapatan PNBPN Sumatera Selatan Naik 12,79%, Belanja Kementerian/Lembaga Tumbuh 5,2%. *Kementerian Keuangan*.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-berita/32267/Pendapatan-PNBP-Sumatera-Selatan-Naik-1279-Belanja-KementerianLembaga-Tumbuh-52.html>
- Zangouinezhad, A., & Azar, A. (2014). How public-private partnership projects impact infrastructure industry for economic growth. *International Journal of Social Economics*, 41(10), 994–1010. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2013-0083>